



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 PENELITIAN TERDHULU

Keberlangsungan pers memiliki artian yang sama dengan jaminan akan demokrasi yang berkelanjutan. Pers memiliki posisi strategis sebagai sumber informasi bagi massa, memiliki peran dalam mengedukasi publik, dan yang paling penting, sebagai pengawas kekuasaan (*watchdog*) yang diterima oleh ketiga lembaga formal.

Peran pers melalui media yang dikaitkan dengan konsep pilar demokrasi ini penting untuk dipastikan keberadaannya. Media yang berperan sebagai jembatan antara yang berkuasa (pemerintah) dan rakyat perlu dipastikan kualitasnya dalam menjalankan fungsi pendidikan ini. Terutama, ketika membahas mengenai kebijakan publik yang dibuat pemerintah memiliki dampak bagi rakyat. Di sini, peran media sangat krusial dalam memastikan kebijakan publik yang dibuat tidak merugikan warga negara. Oleh karenanya, penelitian ini akan membahas mengenai aspek pendidikan publik oleh media mengenai kebijakan publik. Berikut adalah beberapa jurnal yang berkontribusi dalam membantu penulis dalam memetakan ide penelitian.

1. Learning about social movements through news media: deconstructing New York Times and Fox News representations of Standing Rock

Jurnal penelitian yang dibuat oleh Judith Walker dan Pierre Walter ini menginspirasi penulis untuk melakukan penelitian mengenai cara media

‘mendidik’ pembaca mengenai kebijakan publik dan kaitannya dengan pers sebagai pilar demokrasi ke-empat. Walker dan Walter secara kritis ingin memeriksa media sebagai pedagogi publik dapat secara langsung atau tidak langsung ‘berusaha’ dalam mengedukasi dan membentuk ‘apa’ yang ‘dipercayai’ oleh khalayak mengenai *Standing Rock Movement*. Hal yang perlu digarisbawahi dari jurnal ini adalah pembahasan jurnal yang merupakan irisan antara studi jurnalisme dan pendidikan (Walker & Walter, 2018).

Sebagai pemula, jurnal ini menekankan beberapa hal dari sudut pandang studi komunikasi. Media dianggap penting jika berhasil membentuk opini publik dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi dampak politik dan kebijakan publik. Media ‘mengajarkan’ pembacanya akan ‘apa’ yang dianggap penting dan mampu memengaruhi pikiran pembacanya mengenai isu-isu politik dan sosial.

Secara sederhana, gerakan sosial yang dijadikan tema penelitian adalah penolakan akan dibangunnya oli pipa bawah tanah sepanjang 1886 KM yang dilakukan oleh *Dakota Access Pipeline*. Pembangunan ini ditentang karena mengancam keberadaan air di kawasan reservasi suku Indian yang memiliki nilai sejarah. Hal ini menyentuh topik sensitif berupa suku asli Amerika Serikat dan lingkungan dalam waktu bersamaan. Walker dan Walter mengangkat topik ini dengan menitik beratkan mengenai cara media menampilkan pemberitaan mengenai gerakan *Standing Rock Movement*.

Walker dan Walter memperkenalkan kerangka berpikir teoritis berupa *learning through mainstream media about social movements*. Dari sini, Walker dan Walter juga menjelaskan bahwa penelitian mereka ingin menggali lebih dalam dari

sudut pandang studi komunikasi berupa fungsi teori *agenda setting* di dalam media dan dari sudut pandang pendidikan yang menggunakan konsep pedagogi publik. Berikut adalah pembahasan singkat teori dan konsep yang digunakan Walker dan Walter.

a. *Teori Agenda Setting*

Teori ini membahas mengenai kemampuan media dalam memengaruhi opini publik mengenai topik yang dianggap penting. Jurnal ini menghubungkan antara teori *agenda setting* dengan konsep sosial media dan media *mainstream*. Sosial media dan media *mainstream* saling memengaruhi dalam hal membentuk opini publik dan mengindikasikan hal yang dianggap penting oleh media *mainstream* dalam menentukan *agenda setting* berdasarkan opini publik. Walaupun teori ini tidak digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini, temuan yang dimiliki Walter dan Walker berdasarkan penggunaan teori dapat dijadikan argumen pentingnya meneliti media sebagai sumber informasi politik karena agenda media belum tentu sejalan dengan kepentingan publik.

b. *Konsep Pedagogi Publik*

Walker dan Walter melihat media sebagai hal yang penting dalam membentuk pendidikan bagi orang dewasa. Dari sini, konsep pedagogi publik diperkenalkan. Jurnal ini mendefinisikan pedagogi publik sebagai proses pembelajaran yang terjadi ketika ‘melibatkan diri’ di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam artian lain, pedagogi publik terjadi ketika seseorang mempelajari sesuatu secara informal. Walker dan Walter bahkan mengutip pemikiran

Wright dan Sandlin yang mengatakan bahwa pembelajaran di usia dewasa terjadi setiap hari dan media adalah salah satu bentuk pendidikan seumur hidup. Walker dan Walter berargumentasi bahwa media *mainstream* bisa berfungsi sebagai pedagogi publik mengenai *social movement*, menampilkan situasi, aktor-aktor, dan peristiwa yang dapat dikritik, direfleksikan, dan ‘dirasakan’ oleh pembaca.

Teori dan konsep yang digunakan dalam menganalisis media *mainstream* ini penting untuk dibahas karena sangat sedikit *social movement* yang berhasil menarik perhatian media. Jika pun media tertarik, media biasanya justru mendelegitimasi pemberitaan yang ada. Walker dan Walter akan meneliti hadir atau tidaknya hal ini di media *New York Times* dan *Fox News Articles*.

Walker dan Walter memilih menggunakan *Ethnographic Content Analysis* mengenai hubungan antara gerakan sosial dan media dalam memberitakan gerakan sosial *Standing Rock*. Konten berita yang dikumpulkan dimulai sejak April 2016 hingga Maret 2017. Peneliti mengumpulkan sebanyak 164 artikel dari *The New York Times* dan 96 artikel dari *Fox News Articles*.

Penggunaan *ECA* dilakukan agar mampu mengidentifikasi pola-pola yang muncul dan menekankan tema-tema yang digunakan dalam peliputan gerakan sosial oleh NYT dan Fox. Hal tersebut dihubungkan dengan pertanyaan kunci mengenai bagaimana gerakan sosial ini, para aktor, dan makna dari aksi dikonstruksi dengan menggunakan citra, metafora, dan penekanan pada suara tertentu, narasi, dan perspektif.

Dalam menuntun penelitian ini, Walker dan Walter memiliki dua pertanyaan penelitian:

1. Siapa saja aktor yang diidentifikasi di dalam gerakan sosial *Standing Rock* dan bagaimana mereka dikonstruksi?
2. Bagaimana aksi protes dan gerakan ini dikonstruksi melalui penggunaan citra, metafora, bahasa, dan penekanan pada tema tertentu?

Hasilnya, Walker dan Walter menemukan bahwa kedua media secara efektif berhasil dalam membingkai aksi ini sebagai kisah fundamental humanis yang fokus pada penduduk asli (*indigenous people*), para selebriti, veteran A.S yang terlibat, dan mengatasi masalah mengenai perhatian publik mengenai isu perubahan iklim global, pencemaran air, dan hak tanah. Hasil ini menunjukkan pentingnya peran media *mainstream* sebagai *public pedagogy* dalam membentuk pembelajaran mengenai gerakan sosial, dan diperlukannya penelitian lebih lanjut mengenai topik ini dalam konteks media yang berperan dalam mendidik orang dewasa (*adult education*).

Berangkat dari penelitian ini, penulis terinspirasi untuk melakukan riset serupa dengan menambahkan nilai kebaruan berupa penggunaan analisis naratif sebagai metode penelitian. Analisis naratif yang masuk ke dalam penelitian kualitatif akan mampu menjelaskan lebih dalam mengenai representasi pedagogi publik mengenai kebijakan publik yang dilakukan atau tidak dilakukan subjek penelitian. Selain itu, analisis naratif juga akan membantu penulis dalam melihat logika pembuat berita (aspek implisit). Selain menjadi inspirasi penelitian, jurnal ini juga menyumbang

pemahaman awal penulis mengenai konsep pedagogi publik dan memberikan pengetahuan berdasarkan riset terdahulu mengenai peran media dalam mengedukasi publik mengenai isu sosial. Sebagai nilai tambah, penelitian ini akan menambah pembahasan mengenai aspek pendidikan publik media di Indonesia karena sejauh ini, penulis belum menemukan penelitian serupa di jurnal dalam negeri.

2. *The public policy pedagogy of corporate and alternative news media*

Jurnal selanjutnya yang juga membahas pedagogi publik di dalam berita media dibuat oleh Deirdre Kelly pada 2011. Kelly menjadi referensi di beberapa jurnal yang ditemukan penulis ketika melakukan tinjauan pustaka mengenai pedagogi publik di media. Secara umum, Kelly berargumentasi bahwa liputan berita mendalam (*in-depth news coverage*) mengenai isu-isu politik, sosial, dan ekonomi dapat dilihat sebagai *public policy pedagogy*. Kelly melakukan *ethnographic content analysis (ECA)* dengan membandingkan dua media berbeda (media korporat versus media alternatif) mengenai pembuatan kurikulum mengenai orientasi seksual dan identitas gender di British Columbia, Kanada (Kelly, 2011).

Di dalam jurnalnya, Kelly menjelaskan peran penting jurnalisme sebagai anjing penjaga dalam membahas kebijakan publik suatu negara. Namun, kondisi saat ini yang memperlihatkan kepemilikan media yang terkonsentrasi oleh beberapa kelompok menimbulkan kekhawatiran mengenai ‘keberagaman’ pendapat. Kepentingan publik perlu memiliki nilai ‘keberagaman’ sebagai inti dari demokrasi yang sehat.

Berdasarkan kekhawatiran itu, Kelly membuat penelitian ini dengan membingkai berita mendalam sebagai pedagogi kebijakan publik (*public policy pedagogy*). Kelly melihat keberadaan atau ketidakhadiran teks dan gambar pada berita sebagai cara media berita ‘mengajarkan’ publik mengenai keadaan sosial yang dapat dilihat sebagai sebuah ‘masalah’. Kemudian, Kelly melihat ‘bagaimana’ media menempatkan masalah yang dibingkai nantinya akan dilihat sebagai subjek yang pantas dipertimbangkan sebagai bahan kebijakan publik yang sah dan sejauh mana solusi dapat diberikan sebagai bahan pertimbangan.

Dalam kasus ini, Kelly menggunakan pemberitaan dari tahun 1999 hingga 2008 mengenai proses pengajuan kurikulum baru yang berisikan pendidikan orientasi seksual dan identitas gender. Hal ini dimulai oleh guru sekolah dasar sekaligus aktivis LGBT—pasangan Murray dan Peter Corren yang kemudian menikah dan menggunakan nama belakang Corren—yang mengajukan keluhan kepada kementerian pendidikan mengenai *homophobia* dan *heterosexism*. Keluhan ini didasari oleh sekolah dasar di Surrey yang melarang penggunaan buku yang membahas mengenai orientasi seksual gay. Keluarga Corren menilai menteri pendidikan tidak serius menanggapi hal ini.

Kasus ini akhirnya menjadi perhatian publik baik dari kalangan komunitas LGBT, kelompok agama konservatif, dan pemerintah akibat beberapa penolakan. Kelly ingin melihat ‘bagaimana’ isu ini dibingkai oleh media berita milik perusahaan dan media berita alternatif. Kelly menggunakan media *The Sun* sebagai representasi media korporat dan *Xtra West* sebagai media alternatif. Dari *The Sun*,

Kelly menemukan 18 artikel berita, 2 op-ed, dan 1 editorial. Di lain sisi, Kelly menggunakan 16 artikel berita, 3 op-ed, dan 0 editorial.

Dengan menggunakan *ethnographic content analysis (ECA)*, Kelly memiliki dua pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana anteseden, perjanjian penyelesaian (*settlement agreement*), dan implementasi selanjutnya dari berbagai aspek direpresentasikan di media berita milik korporat dan alternatif (cetak dan daring) di British Columbia?
2. Dalam hal apa peliputan berita menjelaskan proses pembuatan kebijakan pendidikan dan dengan cara apa peliputan ini dijelaskan secara samar?

Sebagai kerangka teoritis, Kelly menggunakan teori dan konsep sebagai berikut.

a. Teori demokrasi

Kelly menggunakan teori dari Nancy Fraser yang menjelaskan bahwa teori demokratis memperhatikan perbedaan sosial dan tidak menganggap bahwa persatuan adalah titik awal atau tujuan akhir dari dialog publik. Meskipun publik memiliki berbagai ‘warna’, tidak semuanya memiliki kebebasan yang setara dalam hal menghargai nilai budaya sendiri dan memiliki kesempatan yang sama dalam menyuarakan ide-ide mereka. Kelompok-kelompok ini memiliki kesempatan yang ‘sama’ ketika mempertimbangkan dan mengambil ‘keuntungan’ dari media alternatif. Dengan hadirnya publik alternatif ini, media alternatif berkembang.

Kelly menghubungkan teori ini dengan model demokrasi bagi jurnalisme. Kelly berpendapat bahwa dalam menyajikan berita, penting bagi media untuk menyediakan forum diskusi politik dan ‘menghormati’ pentingnya menyajikan informasi faktual dan menyediakan informasi dasar mengenai bagaimana masyarakat atau kelompok dan proses politik bekerja. Sebagai tambahan, berita jurnalistik perlu membingkai isu-isu politik sebagai subjek untuk diperdebatkan, menghadirkan masalah sosial yang terbuka untuk berbagai intervensi dan solusi yang memungkinkan, dan memobilisasi ketertarikan, keikutsertaan, dan partisipasi warga negara di diskusi publik.

Menariknya, Kelly sedikit menghubungkan teori demokratis di atas dengan teori konflik masyarakat. Kelly membahas mengenai kebijakan yang dapat dilihat sebagai proses yang tunduk pada politik. Setiap langkah diperebutkan oleh kelompok dengan kepentingan. Mereka saling bersaing untuk melegitimasi nilai-nilai yang mereka ‘perjuangkan’. Ketika suatu kondisi berubah status menjadi ‘masalah’ yang dapat diselesaikan dengan suatu rancangan ‘kebijakan’, di sini cara pemingkakan akan memengaruhi ‘apa’ yang dapat diprediksi sebagai dampak dan segala kemungkinan menjadi model analisis kebijakan kritis.

b. *Public policy pedagogy*

Berdasarkan penjelasan di atas, Kelly mendapatkan model analisis alternatif yang disebutnya sebagai *public policy pedagogy*. Pedagogi ini membawa potensi untuk meningkatkan potensi demokrasi di dalam lanskap media. Bias struktural di media berita korporat mengenai hal yang dominan

di masyarakat dapat ditelusuri dari proses produksi media (seperti model bisnis, penggunaan sumber resmi), peredaran (portal berita *online* terbesar umumnya dimiliki oleh media korporat), dan konsumsi (misalnya motivasi dalam ‘menjual’ pembaca kepada pengiklan akan mendorong pembaca sebagai konsumen dibandingkan sebagai warga negara yang memikirkan kesejahteraan sosial).

Bias struktural beserta pemberitaan mengenai norma dan praktik tekstual yang diterima secara umum bekerja sama dalam menciptakan bingkai dominan dari suatu berita. Makna dari bingkai dominan ini tidak bersifat tetap karena setiap cerita terbuka dengan berbagai interpretasi yang bergantung pada lokasi, investasi emosional, dan nilai yang dianut pembaca. Meskipun demikian, pembaca mendapatkan bagian dari ideologi dominan yang terletak di dalam media. Di sini, peran pedagogi masuk sebagai konsep yang mengakui bahwa layaknya sebuah kebijakan, terdapat proses belajar dan mengajar mengenai suatu teks dan bagaimana teks tersebut diinterpretasi dan digunakan oleh pembaca.

Konsep pedagogi mengakui bahwa dibutuhkan situs pembelajaran di luar sekolah formal. Sebagai contoh, media berita yang secara terus menerus memediasi dan mencoba melegitimasi ‘bagaimana’ pembaca melihat kebijakan dan peran mereka sebagai pembaca dalam memahami dan bersikap mengenai masalah yang menjadi perhatian masyarakat.

Dengan menggunakan kerangka teoritis di atas, Kelly menemukan perbedaan antara pemberitaan oleh media korporat dan media alternatif dalam membingkai isu

kurikulum orientasi seksual dan identitas gender. Sebagai media korporat, *The Sun* menampilkan isu ini secara ‘seimbang’ dalam hal mengutip narasumber (setiap mengutip Corren, *The Sun* juga mengutip pemerintah atau kelompok konservatif). Kelly menilai reporter *The Sun* menempatkan berita di titik netral. Dalam hal ini, Kelly melihat netralitas yang ada secara implisit dipahami sebagai menyuarakan dua suara ekstrem (Corren versus kelompok masyarakat yang menolak kurikulum) dalam perdebatan mengenai pendidikan orientasi seksual dan identitas gender. *The Sun* mengutip sumber dari pemerintah sebanyak 66% dari keseluruhan pemberitaan. Media ini menempatkan pemerintah sebagai pihak yang memediasi populasi yang beragam mengenai masalah ekstrem yang tengah diperbincangkan.

Di lain sisi, sebagai media alternatif *Xtra West* secara keseluruhan mendukung upaya Corren dalam meloloskan kurikulum mengenai orientasi seksual dan identitas gender. Sebagai sumber yang digunakan oleh aktivis dan pendidik (*educator*) mengenai isu ini, *Xtra West* juga menampilkan pentingnya hak kelompok gay dan lesbian untuk diperjuangkan di depan pemerintah dan mendukung sesama anggota komunitas LGBT. *Xtra West* secara implisit ‘menantang’ pandangan yang sering ditampilkan media arus utama pada seperti *The Sun*. *Xtra West* menampilkan lebih lanjut kepada pembaca mengenai pandangan dari sudut pandang kelompok LGBT yang berbeda dan mendemonstrasikan kontestasi dan debat yang sering dijadikan argumen kontra pelolosan kurikulum. Tanpa ragu, media ini juga kerap mempertanyakan pernyataan pemerintah dan mendesak jawaban dari pemerintah yang terkadang tidak memberikan komentar. Bahkan, *Xtra West* mendorong para pembacanya sebagai warga negara untuk ikut

menampilkan ketertarikan dan partisipasi di publik mengenai proses kebijakan publik ini. Kelly menyimpulkan bahwa *Xtra West* tidak hanya menyediakan alat dan kriteria yang dapat digunakan pembaca sebagai bahan pertimbangan dalam menilai kebijakan baru, tetapi juga membuat perbedaan dengan menggarisbawahi perlunya kewaspadaan publik untuk meminta dan mengawasi pertanggungjawaban pemerintah dalam berbagai hal sosial yang dinilai bermasalah (dalam kasus ini, penolakan pendidikan mengenai orientasi seksual dan identitas gender).

Hasil dari penelitian ini menarik ketika menempatkan posisi media alternatif sebagai pendidik publik. Memiliki perbedaan yang kontras dengan media korporat yang terjerat kepentingan ekonomi dan politik, penulis melihat potensi media alternatif memiliki kemungkinan lebih memuaskan dalam mendidik publik. Hal ini mendasari penulis dalam memilih *tirto.id* sebagai subjek penelitian. Meskipun *tirto.id* bukan termasuk media alternatif, media ini memiliki nilai tambah karena memiliki struktur internal yang tidak memiliki afiliasi politik. Terlebih, penulis akan membahas Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sebagai objek penelitian.

Selain pemilihan media, jurnal ini juga memberikan argumentasi menarik tentang cara penulis menempatkan media di tengah-tengah isu politik. Media yang secara netral memberitakan isu rancangan kebijakan publik dapat dilihat sebagai media yang ‘kurang’ mempertanyakan masalah yang dianggap layak memasuki ranah pembahasan kebijakan publik yang nanti sifatnya akan mengikat warga negara secara hukum.

Walaupun tidak secara eksplisit menyebutkan karakteristik *public policy pedagogy*, penelitian ini menjadi contoh cara menempatkan media sebagai

pedagogi publik dari sudut pandang politik. Dalam melihat media sebagai pedagogi publik, penulis mendapatkan pemahaman dari kerangka teoritis Kelly yang menggunakan teori demokrasi (walaupun bukan menjadi fokus utama penulis) bahwa posisi media sebagai pedagogi publik memiliki risiko tidak memberikan kesempatan yang sama dalam menyuarakan ide-ide kelompok yang berbeda. Terutama, ketika membahas kebijakan publik yang dianggap tunduk pada politik di mana setiap langkah diperebutkan oleh kelompok yang memiliki kepentingan. Hal ini tidak akan didapatkan penulis jika hanya terfokuskan pada pedagogi publik sebagai sebuah konsep pendidikan informal bagi orang dewasa.

Selain itu, jurnal ini memberikan pemahaman mengenai cara melihat ideologi dominan yang diakui media untuk dijadikan ‘bahan permasalahan’ di kalangan pembaca. Bagian yang terpenting, jurnal ini menyumbang pemikiran eksplisit mengenai media berita yang secara konseptual diletakkan sebagai tempat memediasi dan melegitimasi masalah publik yang pantas mendapatkan perhatian publik dan perhatian pemerintah sebagai pembuat kebijakan publik.

3. Liquid subjects: news media and public political pedagogy

Jurnal selanjutnya yang ditemukan penulis membahas mengenai cara media membentuk opini publik dan melakukan perubahan sosial (dalam kasus ini, mobilisasi). Kasus perubahan sosial yang dibahas diukur melalui komitmen melakukan perubahan akibat edukasi media mengenai perubahan iklim. Isu ini menjadi isu yang sulit untuk dipastikan tingkat komitmennya, yang oleh karenanya, menjadi tolok ukur yang ekstrem dalam menilai pengaruh media yang sesungguhnya.

Jurnal yang dibuat oleh Marcelina Piotrowski dan Claudia Ruitenberg memiliki aliran kritis di dunia pendidikan. Irisan antara jurnalisme dan studi pendidikan ini ingin mencari tahu peran media *mainstream* dan alternatif dalam mobilisasi warga negara mengenai perubahan iklim. Jurnal ini memberikan pandangan dari lensa pedagogi publik. Pendidikan mengenai politik menjadi saling terkait dengan budaya konsumen dan peran media dalam memberikan pendidikan serta sosialisasi mengenai subjektivitas politik muncul. Piotrowski dan Ruitenberg berargumentasi bahwa pendidikan politik saat ini adalah bagian dari konsumerisme dan budaya media. Individu secara selektif mengekspos diri dan menginspeksi berbagai representasi media tidak hanya dalam hal isu politik, tetapi juga didasari oleh subjektivitas politik dan aksi (Piotrowski & Ruitenberg, 2015).

Jurnal ini pada dasarnya juga meneliti mengenai hubungan antara media dan kewarganegaraan. Berita selain berperan sebagai medium pendidikan juga dapat dilihat isinya sebagai kegiatan mengonsumsi informasi. Jurnal ini tidak hanya melihat isu sosial dan peran media dalam konteks pendidikan politik, tetapi juga mengenai kegiatan mengonsumsi berita dan efeknya terhadap sosialisasi dan proses edukasi warga negara sebagai subjek politik. Menurut Piotrowski dan Ruitenberg, media tidak hanya memberikan aspek pendidikan, tetapi juga memberikan cara mengenai 'bagaimana' bersikap politik dan bertindak politik berdasarkan hal yang dianggap penting bagi pembaca sebagai warga negara. Penelitian ini melibatkan wawancara kelompok (*group interview*) dengan lebih dari 50 penduduk Vancouver di Kanada yang direkrut menggunakan survei dengan kriteria mencari peserta yang memiliki 'kekhawatiran' mengenai perubahan iklim tetapi belum pernah

melakukan mobilisasi politik. Wawancara ini mencakup diskusi mengenai berbagai berita arus utama dan berita alternatif. Diskusi yang diadakan berfokus pada aksi politik lingkungan melalui berbagai lensa, termasuk aksi di tingkat pembuatan kebijakan lokal dan internasional, dan aktivisme individu dan kolektif. Wawancara kelompok juga termasuk kegiatan di mana para peserta membuat cerita berita mereka sendiri, menunjukkan topik berita, dan bagaimana membingkai topik-topik itu akan melibatkan mereka secara politik dalam masalah sosial seperti perubahan iklim.

Ketika meninjau transkrip wawancara berdasarkan hasil diskusi dengan para peserta, Piotrowski dan Ruitenberg menemukan topik baru yang tidak diantisipasi tetapi menarik untuk diikutsertakan: cara warga membaca berita. Objektif penelitian pada awalnya tertarik pada efektivitas dan penerimaan artikel berita mengenai tindakan perubahan iklim. Kemudian, peneliti melihat praktik cara membaca berita peserta dan asumsi yang dilibatkan di dalam berita memainkan peran penting dalam subjektivitas dan keterlibatan politik individu. Tetapi, Piotrowski dan Ruitenberg tidak menganalisis penelitian secara lengkap dan hanya memanfaatkan hasil diskusi dengan cara yang generatif untuk menyajikan argumen-argumen penelitian.

Konsep yang digunakan di jurnal ini adalah pedagogi publik politik. Media berita menyediakan sarana untuk pendidikan tidak hanya tentang isu-isu politik dan gerakan sosial, tetapi juga tentang model 'menjadi politik' dan 'bertindak secara politik', yaitu tentang subjektivitas politik itu sendiri. Perbedaan ini dapat diamati dalam penelitian yang berfokus pada apa yang dapat diajarkan oleh berita tentang

kebijakan publik atau masalah sosial tertentu, dan yang berfokus pada bagaimana konten berita dan praktik konsumsi berita terjerat dalam proses subjektivitas politik individu. Pedagogi publik politik fokus pada cara-cara di mana konten media bisa bersifat pedagogi. Dalam kasus ini, Piotrowski dan Ruitenber menggunakan pedagogi publik untuk merujuk pada praktik pendidikan mengenai kewarganegaraan. Hal ini dibangun dengan argumentasi bahwa antara pedagogi publik dan politik bahwa penyajian berita mengenai isu gerakan sosial tidak hanya bersifat sebagai pedagogi publik mengenai kebijakan sosial dan lingkungan, tetapi memasuki juga ranah politik.

Jika mengaitkan antara jurnal ini dan penelitian penulis, konsep pedagogi publik yang berasal dari ilmu pendidikan menjadi tantangan tersendiri karena penulis lebih familier dengan istilah dari ilmu jurnalistik yang melihat salah satu fungsi pers adalah fungsi pendidikan. Tetapi, jurnal ini memberikan kemudahan bagi penulis untuk mengenali konsep ini lebih dalam ketika melakukan studi pustaka sebelum melakukan penelitian. Penulis yang bertemu dengan konsep pedagogi publik politik menjadi lebih terbantu dalam melihat pentingnya peran media dalam melakukan pendidikan politik ketika dihubungkan dengan mobilisasi politik. Untuk penelitian ini, penulis akan menggunakan konsep orisinal pedagogi publik sebagai konsep penelitian ketimbang pedagogi publik politik karena fokus penelitian yang bukan pada dampak media di dalam mobilisasi politik, tetapi kepada penyajian informasi oleh media alternatif kepada pembaca.

Konsep selanjutnya yang digunakan jurnal ini adalah peran diri politik di dalam *liquid modernity*. Konsep ini menggambarkan hubungan yang dimiliki

individu dengan masyarakat. Kehidupan individu dilihat sebagai proyek personal yang kerap memperbarui diri. Pembawaan diri untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat tidak terjadi secara cuma-cuma, hal ini menjadi tugas bagi setiap individu. *Liquid modernity* ditandai dengan meningkatnya ketidakpastian tentang masa depan dan pertumbuhan dan sikap mengandalkan individualitas dan pilihan sebagai sumber ketidakpercayaan. *Modernity* didefinisikan sebagai pengejaran makna yang konstan untuk memberikan soliditas pada hubungan dan institusi yang hancur untuk membentuk modernitas.

Selanjutnya, konsep-konsep ini juga dihubungkan dengan konsumsi politik yang dimiliki oleh individu. Sikap konsumtif sendiri sering dikaitkan sebagai sebuah 'demokrasi' karena menunjukkan adanya 'kebebasan' dalam memilih oleh para teoretis neoliberal ekonomi. Piotrowski dan Ruitenbergh menghubungkan ini dengan cara melihatnya melalui pendekatan berbasis konsumen terhadap aktivisme dan subjektivitas politik itu sendiri. Sebagai contoh, Piotrowski dan Ruitenbergh menjelaskan bahwa Individu secara selektif mengekspos diri sendiri ke berbagai representasi media. Kegiatan ini dikaitkan dengan 'demokrasi' dalam artian setiap orang secara bebas memaparkan diri sendiri dengan konten media dan memutuskan memilih bersikap politik sesuai dengan apa yang mereka 'dapatkan' dari media itu sendiri.

Konsep mengenai pedagogi politik dan *liquid modernity* ini jika dikontekskan dengan konsumsi politik dapat dilihat sebagai cara subjek *liquid* (masyarakat) yang mengonsumsi (*consumerism*) sebagai bentuk demokrasi (kebebasan mengonsumsi yang diinginkan) ketika membaca berita mengenai aksi politik. Hal ini juga

mengikutsertakan pembahasan mengenai keinginan masyarakat melihat bukti bahwa aksi politik 'berhasil' sebelum melakukan komitmen untuk ikut serta dalam aksi, skeptisisme mengenai waktu yang mereka investasikan akan terbayar, dan menjauhkan diri dari segala bentuk aktivitas politik yang disarankan oleh berita. Hal ini dijelaskan sebagai *monitorial news practices* yang dianggap sebagai cara warga negara sekaligus konsumen berita belajar memindai secara efektif partisipasi politik mereka. Warga negara menganggap berpartisipasi secara politik dalam bentuk solidaritas tanpa bukti mengenai keberhasilannya dianggap tidak efektif dan tidak signifikan. Warga negara ingin secara cermat mempertimbangkan sikap politik mereka berdasarkan tingkat keberhasilan. Hal ini didapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa peserta.

Piotrowski dan Ruitenbergh memulai wawancara kelompok ini dengan menunjukkan partisipan artikel berita mengenai beberapa gambar yang menunjukkan demonstran melakukan aksi. Berdasarkan hasil wawancara, Piotrowski dan Ruitenbergh memiliki kesimpulan bahwa ketimbang memberi tekanan pada berita alternatif untuk menjunjung tinggi 'misi demokratis jurnalisme', salah satu aspek dari pendidikan politik yang dapat menjadi panduan peserta didik adalah merefleksikan praktik-praktik konsumsi informasi mereka tentang isu-isu sosial. Secara khusus, refleksi semacam itu dapat fokus pada jenis harapan yang ditempatkan pada berita untuk menegakkan fungsi demokrasi dalam kaitannya dengan keterlibatan politik. Mengembangkan seperangkat praktik media kritis dan pedagogi politik publik anti-konsumerisme yang mempertanyakan tidak hanya konten berita komersial, tetapi juga apa peran konsumsi berita seperti pendidikan

mandiri kritis tentang urusan saat ini dan politik dapat mengarah untuk refleksi tentang kesediaan masyarakat untuk membuat komitmen kolektif dalam gerakan sosial yang sifatnya tidak pasti.

Poin menarik dari penelitian ini hadir ketika membahas bahwa keinginan partisipan untuk ‘membuat perbedaan’ diikuti dengan sikap selektif dan kritis sebagai subjek politik. Hal ini dilakukan dengan menempatkan persepsi bahwa pilihan yang tidak memadai untuk berpartisipasi secara politik yang sepadan dengan waktu mereka adalah perbedaan produktif yang berkontribusi dalam sikap *liquid modernity* mereka.

Jurnal kritis ini memberikan pemahaman kompleks kepada penulis mengenai peran media yang dilihat dengan lensa yang lebih luas (di luar isi yang disajikan media). Untuk derajat tertentu, jurnal ini memberikan perspektif pembaca mengenai alasan mereka untuk ikut atau menolak melakukan mobilisasi politik seperti aksi demonstrasi berdasarkan isi yang mereka lihat dari media berita. Hal ini menambah urgensi media dalam memanfaatkan kanal yang tersedia sebagai sumber informasi yang memiliki potensi menggerakkan mobilisasi politik masyarakat kritis. Jika dikontekskan dengan kondisi di Indonesia, penulis belum menemukan penelitian yang membahas ranah ini. Oleh karenanya, penulis memutuskan untuk melakukan langkah pertama dalam melihat isi media sebagai gambaran awal hadir tidaknya pedagogi publik di ranah politik melalui media *tirto.id*.

4. *The influence of citizenship norms and media use on different modes of political participation in the US*

Jurnal ini dibuat oleh Lauren Copeland dan Jessica Feezell pada tahun 2017. Secara singkat, jurnal ini membahas mengenai bagaimana sikap seseorang dalam memaknai konsep ‘warga negara yang baik’ mendikte mereka mengenai partisipasi politik seperti apa yang seharusnya dilakukan dan apakah penggunaan media tertentu memoderasi hubungan ini (Copeland & Feezell, 2017).

Menggunakan survei dengan jumlah partisipan 2200 orang dewasa di Amerika, Copeland dan Feezell merumuskan tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Apa hubungan antara norma kewarganegaraan dan perbedaan metode partisipasi?
2. Apa hubungan antara penggunaan media tradisional dan media digital untuk informasi politik dan bentuk partisipasi yang sesuai?
3. Apakah penggunaan politik media tradisional dan digital memoderasi hubungan antara norma kewarganegaraan dan bentuk partisipasi yang secara karakteristik serupa?

Beberapa peneliti berargumen bahwa norma kewarganegaraan memengaruhi bagaimana cara seseorang berpartisipasi secara politik. Studi yang memprediksi peran individu dalam partisipasi politik penting untuk menambah pemahaman mengenai sistem perwakilan dan pemerintahan demokratis. Hal ini dapat dilihat dari norma kewarganegaraan yang dipegang oleh seseorang. Bahkan, beberapa periset berargumen jika norma dianggap tidak penting, maka warga negara tidak akan berpartisipasi karena ‘harga’ berpartisipasi dianggap ‘lebih tinggi’ dibandingkan manfaat yang didapatkan.

Norma kewarganegaraan adalah nilai-nilai yang dianut seseorang mengenai ‘sikap’ apa yang dianggap sebagai ‘warga negara yang baik’. Copeland dan Feezell mengutip norma kewarganegaraan versi Dalton dan Bennett di dalam penelitian ini. Dalton membagi norma kewarganegaraan ke dalam dua kategori: *dutiful citizens* (warga negara berbakti) dan *actualizing citizens* (warga aktualisasi).

Menurut Dalton, *dutiful citizens* adalah warga negara yang cenderung berpartisipasi dalam pemilihan umum (pemilu) karena pemahaman sosial tentang politik—yang mengacu pada sikap hormat kepada otoritas, kesetiaan terhadap negara, dan kewajiban moral untuk berpartisipasi dalam politik—dapat merangsang hasil pemilu dan partisipasi dalam bentuk tindakan lain yang dilembagakan. Konsep ini memiliki kemungkinan lebih kecil untuk berpartisipasi ke dalam tindakan non-pemilu atau mode perilaku individual seperti aksi protes, pawai, atau demonstrasi. Hal ini dikarenakan persepsi mereka mengenai ‘warga negara yang baik’ menekankan pada pentingnya tatanan sosial dan mematuhi hukum.

Di lain sisi, Bennett menjelaskan *actualizing norms* sebagai warga negara yang berkemungkinan besar terlibat di dalam partisipasi non-pemilu karena pemahaman mereka mengenai ‘warga negara yang baik’ memerlukan pemikiran independen, tanggung jawab sosial, dan ekspresi pribadi. Warga negara yang masuk ke dalam kategori ini tidak merasa memiliki kewajiban terhadap pemerintah, memiliki rasa tidak percaya kepada politisi, dan rasa tidak suka menjadi anggota dalam organisasi politik tradisional.

Penggunaan media dan sikap politik mengembangkan kedua konsep kewarganegaraan tersebut. *Dutiful citizens* dan *actualizing citizens* memiliki gaya

penggunaan media yang sesuai dalam menyampaikan logika komunikasi masing-masing. Logika ini mendeskripsikan bagaimana seseorang mendapatkan informasi politik dan bagaimana mereka menggunakan media untuk mengatasi keluhan sosial dan politik. Berdasarkan logika ini, *dutiful citizens* dideskripsikan dengan komunikasi satu arah yang berasal dari sumber resmi. Tipe ini memiliki batasan yang jelas antara pengguna dan produser, dan informasi cenderung berasal dari media berita arus utama. *Dutiful citizens* menunjukkan preferensi pada media konvensional karena lebih menghargai informasi yang disediakan oleh pihak resmi.

Di lain sisi, *actualizing citizens* menunjukkan preferensi ke media digital karena lebih menghargai informasi yang dibuat dan ‘disediakan’ oleh rekan-rekan mereka, memproduksi dan mendistribusikan konten politik mereka, berhubungan dengan orang lain melalui jaringan atau kelompok yang disediakan oleh rekan-rekan mereka, dan terlibat dalam aktivitas yang dilakukan oleh rekan mereka. Karena norma kewarganegaraan jenis ini secara konseptual terlibat dalam sikap politik non-pemilu, mereka juga menyukai informasi dari media digital karena memberikan *connective action* yang memfasilitasi kegiatan non-pemilu seperti menyebarluaskan tindakan personal mengenai politik.

Sebagai hasil, Copeland dan Feezell mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian yang secara faktual ‘sedikit’ tidak sesuai dengan prediksi. Literatur teoritis yang digunakan menunjukkan norma kewarganegaraan dan pengguna media saling terkait untuk memperkuat hubungan antara norma dan partisipasi. Literatur empiris tentang penggunaan dan partisipasi media menimbulkan pertanyaan tentang apakah penggunaan media tradisional dan digital hanya akan

meningkatkan kemungkinan terlibat dalam bentuk partisipasi politik yang secara karakteristik serupa. Copeland dan Feezell menemukan hal-hal berikut berdasarkan survei yang dilakukan.

1. Sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian pertama, Copeland dan Feezell menemukan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara skala norma kewarganegaraan yang menimbulkan bahwa *actualizing norms* memiliki keterkaitan dengan semua bentuk partisipasi (pemilu dan non-pemilu). Hal ini menentang konsep yang menyebutkan bahwa *actualizing norms* tidak terlibat dalam sikap politik berupa mengikuti pemilihan umum karena dianggap ‘resmi’ dan ‘tidak personal’.
2. Pertanyaan penelitian kedua yang membahas mengenai hubungan antara penggunaan media dan mode partisipasi menunjukkan bahwa media tradisional dan media digital (keduanya) memengaruhi kedua bentuk partisipasi politik (*dutiful* dan *actualizing*). Sebagai tambahan, media digital meningkatkan kemungkinan partisipasi non-politik. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara penggunaan media digital dan norma kewarganegaraan. Artinya, mereka yang memiliki skor tinggi menurut indeks peneliti memiliki kemungkinan lebih besar dalam menggunakan media digital. Penemuan ini menentang logika komunikasi kedua norma kewarganegaraan.
3. Hasil survei untuk pertanyaan penelitian ketiga menunjukkan bahwa warga negara yang masuk ke dalam *actualizing citizens* berkemungkinan lebih tinggi dalam berpartisipasi secara *dutiful* (mengikuti pemilu) dan

actualized participation (partisipasi non-pemilu). Hasil ini menentang bahwa norma kewarganegaraan tertentu hanya terklasifikasi ke dalam satu sikap politik yang kaku.

Terjadinya malasuai berdasarkan hasil penelitian ini menjadi argumentasi dasar penulis dalam menganalisis media sebagai pedagogi publik di domain politik. Sebagai dasar argumentasi, penelitian ini menyumbang konsep kewarganegaraan yang ternyata memengaruhi sikap politik seseorang. Sikap politik ini memiliki keterkaitan dengan penggunaan media sebagai sumber informasi warga negara mengenai domain politik. Konsep kewarganegaraan ini disajikan oleh Copeland dan Feezell berdasarkan pemikiran Dalton karena dianggap sebagai konsep mengenai kewarganegaraan yang berpengaruh. Setelah melakukan penelitian, Copeland dan Feezell menemukan bahwa konsep mengenai tipe warga negara ini tidak sesuai dengan realitas yang ada. *Dutiful citizens* dan *actualizing citizens* sama-sama terlibat dalam kegiatan pemilu. *Actualizing norms* yang diklasifikasikan ke dalam kelompok non-pemilu ternyata justru terlibat ke dalam sikap politik yang awalnya hanya ditujukan kepada *dutiful citizens*.

Bagian yang paling penting dari penelitian ini adalah logika komunikasi kedua konsep norma kewarganegaraan dan hubungannya dengan sikap politik mereka. Penemuan lapangan menunjukkan bahwa *dutiful citizens* dan *actualizing citizens* dipengaruhi oleh penggunaan media tradisional dan media digital. Bahkan, penggunaan media digital memiliki kemungkinan lebih tinggi dalam mendorong kegiatan politik yang masuk ke dalam kategori *actualizing citizens* seperti mengadakan aksi protes, pawai, atau demonstrasi. Penggunaan media digital

sebagai corong yang mendukung sikap politik seperti ini menimbulkan pertanyaan dari sudut pandang jurnalistik mengenai konten seperti apa yang diterima oleh warga negara dalam melakukan kegiatan politik yang sifatnya lebih ‘fleksibel’ ini.

Penulis melihat celah ini sebagai latar belakang dalam melakukan analisis naratif karena beberapa kekhawatiran. Media sebagai sumber informasi politik warga negara jika memproduksi konten yang tidak mendidik dapat menyesatkan kegiatan politik khalayak. Dalam skenario terburuk, keberlangsungan demokrasi dan kesejahteraan umum—dalam kasus ini, kebijakan publik—terganggu oleh pemahaman yang salah dalam melakukan penolakan atau penerimaan suatu kebijakan publik.

Berdasarkan keempat jurnal di atas, penulis mendapatkan beberapa pengetahuan dasar dan menemukan celah penelitian untuk melihat situasi antara media dan pendidikan politik di Indonesia. Berikut adalah tabel berisikan rangkuman penelitian terdahulu yang digunakan penulis.

Tabel 2.1 Rangkuman Penelitian Terdahulu

No	Nama Jurnal	Hasil	Relevansi
1	<i>Learning about social movements through news media: deconstructing New York Times and Fox News Representations of Standing Rock</i>	NYT dan Fox News berhasil secara efektif membingkai <i>standing rock movement</i> sebagai kisah fundamental humanis dan fokus pada pemberitaan mengenai dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan jika aksi ini gagal dipenuhi. Ini menunjukkan peran penting media dalam mengedukasi pembaca mengenai gerakan sosial dan diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai orang dewasa yang menjadikan media sebagai pedagogi publik.	Jurnal ini menyumbang konsep pedagogi publik. Konsep ini menyumbang 'kebaruan' topik penelitian mengenai analisis isi media yang ada di Indonesia. Terlebih, jika dikaitkan dengan kebijakan publik yang menimbulkan sikap politik berupa penolakan dari warga negaranya.
2	<i>The public policy pedagogy of corporate and alternative news media</i>	<i>The Sun</i> (media korporat) dan <i>Xtra West</i> (media alternatif) memiliki perbedaan dalam memberitakan isu kebijakan publik. <i>The Sun</i> secara umum	Jurnal ini memberikan gambaran mengenai peran media sebagai pedagogi publik dijalankan lebih baik oleh media alternatif dibandingkan media korporat.

No	Nama Jurnal	Hasil	Relevansi
		<p>lebih banyak mengutip sumber resmi (pemerintah) dan bersifat netral dalam pemberitaan (tidak mendorong warga negara untuk berpartisipasi). Di lain sisi, <i>Xtra West</i> lebih banyak menggunakan berbagai sumber, berani mempertanyakan pernyataan pemerintah, menghadirkan sudut pandang yang tidak dihadirkan media korporat, dan mendorong warga negara untuk terlibat secara aktif.</p>	<p>Meskipun demikian, media sebagai pedagogi publik tidak mungkin memberikan kesempatan yang sama kepada kelompok berbeda untuk diberikan ruang untuk berpendapat mengenai suatu kebijakan publik. Dari sini, penulis tertarik melihat fungsi pedagogi publik dari media korporat <i>trto.id</i> sebagai pendidik publik.</p>
3	<p><i>Liquid subjects: news media and public political pedagogy</i></p>	<p>Ada keterkaitan antara pendidikan mengenai politik dengan budaya konsumen yang menyebabkan seseorang bebas mengonsumsi berita. Hal ini berhubungan dengan sikap individu yang kritis dan terus memperbaiki diri di kehidupan modern (<i>liquid subjects</i>) dan peran media dalam memberikan pendidikan politik yang mampu mendorong mobilisasi politik seseorang.</p>	<p>Warga negara yang bersifat kritis (<i>liquid subjects</i>) dapat dilihat sikap mobilisasi politiknya berdasarkan konsep kewarganegaraan yang dipenagruhi oleh <i>political public pedagogy</i>. Hal ini menentukan apa yang dianggap penting oleh warga negara berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Ini menambah nilai urgensi dalam memastikan isi berita didasari oleh nilai-nilai pedagogi publik.</p>
4	<p><i>The influence of citizenship norms and media use on different modes of political participation in the US</i></p>	<p>(1) <i>Actualizing citizens</i> memiliki keterkaitan dengan bentuk partisipasi pemilu dan non-pemilu. (2) Media tradisional dan media digital memengaruhi kedua bentuk partisipasi politik. Sebagai tambahan, media digital meningkatkan kemungkinan partisipasi non-politik. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara penggunaan media digital dan norma kewarganegaraan. (3) Warga negara <i>actualizing</i> berkemungkinan lebih tinggi untuk berpartisipasi secara <i>dutiful</i> (mengikuti pemilu) dan <i>actualized participation</i> (partisipasi non-pemilu).</p>	<p>Menjadi penelitian terdahulu yang mendukung riset penulis. Dengan ditemukannya fakta lapangan bahwa penggunaan media digital memengaruhi sikap partisipasi politik warga negara baik yang <i>dutiful</i> atau <i>actualizing</i>, ini menekankan pentingnya memastikan konten media yang dikonsumsi memberikan informasi yang tepat. Ketepatan ini dalam domain politik dapat dilihat berdasarkan konsep pedagogi publik yang akan digunakan. Dengan bantuan konsep kewarganegaraan dari jurnal ini (beserta perkembangannya di luar jurnal ini) dan konsep <i>journalism as fourth estate</i>, penulis dapat melihat apakah media telah melakukan peran dan fungsinya dalam memastikan publik tidak salah langkah dalam mengawal kebijakan publik</p>

Sumber: Penulis, 2020

2.2 TEORI DAN KONSEP

2.2.1 Pedagogi publik atau Pendidikan Publik

Secara sederhana, pedagogi publik dapat diartikan sebagai pendidikan yang diterima seseorang (dalam berbagai studi, fokusnya adalah orang dewasa) di luar institusi formal seperti sekolah. Konsep ini pertama kali muncul di tahun 1894. Meskipun di awal kemunculannya pedagogi publik memiliki artian yang sedikit berbeda, terdapat kekonsistenan di mana konsep ini digunakan untuk mengisyaratkan bentuk pendidikan untuk kepentingan publik (Sandlin & Burdick, 2011, pp. 341-342).

Sudut pandang pertama dalam menjelaskan pedagogi publik datang dari Gert Biesta yang membahas mengenai sikap ‘menjadi publik’ (*becoming public*) yang hadir berkat hubungan antara pedagogi publik, warga negara, dan ruang publik. Biesta mendefinisikan pedagogi publik sebagai intervensi pendidikan untuk kepentingan kualitas publik berupa kebersamaan manusia (*human togetherness*) secara umum (Biesta, 2012).

Biesta berargumentasi bahwa sudah saatnya ide mengenai pedagogi publik dipahami dengan cara yang lebih terprogram dan lebih politis yaitu dengan melihat intervensi edukasi yang diberlakukan demi kepentingan kualitas publik atas ruang dan tempat serta kualitas ‘manusia’ secara umum (Biesta, 2012). Hal ini menarik ketika dikaitkan dengan salah satu tujuan jurnalisme yang berkualitas adalah memastikan ‘debat publik’ yang ada di ruang publik juga berkualitas. Dalam kasus pemberitaan omnibus law, partisipasi warga negara berdasarkan ‘level pemahaman’ yang didapatkan dari media juga berhubungan dengan potensi menciptakan ruang

publik yang berkualitas ketika memperdebatkan kebijakan publik. Biesta percaya bahwa pendidikan dan politik memiliki posisi penting dalam domain publik.

Namun, Biesta memiliki kekhawatiran sejak kemunculan privatisasi dan depolitisasi ruang dan tempat publik dalam ranah pendidikan yang semakin diposisikan dan dianggap sebagai barang pribadi. Pendidikan menjadi sarana keuntungan pribadi (ekonomi), bukan sebagai barang publik yang berorientasi pada demokrasi dan keadilan sosial (Biesta, 2014). Biesta menjelaskan bahwa ruang publik jangan diartikan sebagai lokasi fisik, melainkan bentuk interaksi tertentu. Biesta menempatkan ruang publik sebagai tempat di mana kebebasan hadir di dalamnya (Biesta, 2012).

Berangkat dari hal tersebut, Biesta mencoba memberikan pemahaman konseptual mengenai ‘pekerjaan’ pendidikan seperti ‘apa’ yang dapat dilakukan dan jenis pedagogi yang dapat diterapkan untuk kepentingan kualitas publik. Selain ‘apa’ yang berusaha dijelaskan Biesta sebagai pedagogi publik, di dalam jurnal-jurnalnya Biesta juga menempatkan ‘siapa’ yang bertanggung jawab atas tugas tersebut. Peran ‘siapa’ diistilahkan sebagai pedagog sebagai pihak yang melakukan ‘pekerjaan’ pendidikan yang disengaja. Biesta (2012, 2014) kemudian mencetuskan tiga bentuk pedagogi publik yang berbeda berdasarkan peran yang dilakukan oleh pedagog.

1. Pedagogi untuk publik (*pedagogy for the public*)

Bentuk utama dari bentuk ini adalah ‘instruksi’. Bentuk ini menempatkan dunia sebagai sekolah dan peran utama agen pendidikan adalah memberikan instruksi kepada warga negara. Ini melibatkan memberitahu warga negara

‘apa’ yang harus dipikirkan, cara bertindak, dan yang paling penting ‘apa’ yang harus dilakukan. Sebagai contoh, Biesta menjelaskan bentuk pedagogi publik ini sering dilakukan oleh negara yang menginstruksikan warga negaranya untuk mengikuti aturan hukum yang berlaku, bersikap toleran, sopan, aktif, atau negara bisa secara eksplisit memberitahu warga negaranya cara mereka seharusnya bersikap atau secara implisit berdasarkan berbagai sistem penghargaan dan hukuman (*rewards and punishments*) (Biesta, 2012).

Dalam bentuk pedagogi ini, pedagog mengajarkan warga negara sebuah ‘pelajaran’. Hal ini dapat dilihat sebagai nada moralistik karena pada akhirnya ditujukan untuk memberikan instruksi kepada warga negara mengenai ‘bagaimana’ mereka seharusnya berperilaku. Masalah utama dari bentuk ini berkaitan dengan perbedaan mendasar antara ‘logika’ sekolah dan ‘logika’ politik demokratis. Biesta melihat hal ini sebagai bentuk ‘pengajaran’ yang berisiko menghapus keberagaman di mana kebebasan dapat muncul.

2. Pedagogi publik (*pedagogy of the public*)

Berdasarkan bentuk pertama di atas, Biesta melakukan pendekatan lain dengan melihat pedagogi publik dari sudut pandang pembelajaran. Ketimbang instruksi, Biesta menempatkan pembelajaran dilakukan oleh publik sendiri (*pedagogy of the public*).

Bentuk ini meletakkan peran agen pendidikan sebagai fasilitator. Berbeda dengan bentuk *pedagogy for the public*, arah yang digunakan dalam proses *pedagogy of the public* tidak ditentukan dari luar, tetapi bagian dari hal yang dipertaruhkan dalam proses pembelajaran politik secara kolektif.

Pertanyaan mengenai agen pendidikan yang dipahami sebagai fasilitator ataupun kasus di mana agen pendidikan perlu memfasilitasi jenis pembelajaran khusus yang bertujuan untuk suatu pemahaman. Kedua hal tersebut bergantung pada pandangan seseorang mengenai jenis pengetahuan dan pemahaman yang seharusnya dihasilkan dari pembelajaran politik dan tindakan politik yang dibutuhkan (Biesta, 2012).

Meskipun interpretasi ini terhubung dengan lebih baik dengan gagasan mengenai pluralitas, kekurangan bentuk ini adalah meletakkan demokrasi di bawah rezim 'pembelajaran'. Berdasarkan hal ini, Biesta mempertanyakan mengenai 'apa' yang perlu dipelajari tentang kewarganegaraan demokratis. Tuntutan untuk belajar ini membuat 'politik pembelajaran' sebagai hal yang masuk ke dalam pedagogi publik memiliki kecenderungan untuk mengubah masalah sosial dan politik menjadi masalah pembelajaran. Hal ini mengakibatkan masalah sosial dan politik menjadi tanggung jawab individu (sebagai dampak pembelajaran) daripada dilihat sebagai hal yang seharusnya menjadi perhatian dan tanggung jawab kolektif (Biesta, 2014).

3. Pedagogi untuk publisitas/kepublikan (*pedagogy for publicness*)

Biesta memperkenalkan bentuk ketiga ini untuk melampaui kedua bentuk sebelumnya dengan melihat adanya persimpangan antara pendidikan dan politik yang tidak terpaku pada logika sekolah (di mana ada instruksi atau fasilitator). Perhatian mengenai *pedagogy for publicness* adalah kepedulian terhadap kualitas publik dari kebersamaan manusia. Hal ini akan memungkinkan adanya aktor-aktor dan kegiatan-kegiatan yang menjadi

publik. Menjadi publik bukan hanya ‘berpindah tempat’ dari rumah ke jalan, tetapi membentuk kebersamaan manusia yang menggambarkan adanya keberagaman. Menjadi publik adalah menciptakan ruang publik. Dari interpretasi ini, agen pendidikan bukanlah seorang instruktur atau fasilitator, tetapi ‘seseorang yang mengganggu’. Ini adalah elemen yang dapat menjadi ‘tes’ kualitas publik. Tujuan dari interupsi atau gangguan ini bukanlah untuk mengajari hal yang seharusnya dilakukan atau menuntut jenis pembelajaran tertentu, tetapi untuk membuka peluang menjadi publik tetap ada (Biesta, 2012).

Mode ketiga pedagogi publik ini tidak berupa instruksi publik atau fasilitas pembelajaran oleh publik. Hal ini memberikan ruang untuk menjadi lebih aktif, lebih eksperimental, dan lebih demonstratif. Biesta juga menyebut *pedagogy of publicness* sebagai sebuah pedagogi demonstrasi dan bukan sebuah kurikulum yang harus diajarkan atau dipelajari. Hal ini dianggap sebagai bentuk pedagogi yang sepenuhnya bersifat publik baik dalam orientasi atau pelaksanaannya (Biesta, 2014).

Berdasarkan tiga bentuk di atas, peneliti melihat bentuk *pedagogy of the public* sebagai pembagian yang paling tepat untuk penelitian ini. Menggunakan konsep pedagogi publik sebagai kriteria media yang memberitakan hal mendidik, penulis menempatkan media berita sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, proses ‘pembelajaran’ dilakukan oleh publik itu sendiri melalui institusi informal yaitu media *tirto.id*. Sebagai media yang bukan berasal dari instansi pemerintah (dalam

kasus ini dilihat sebagai institusi resmi yang memberikan instruksi), *tirto.id* memberikan ruang bagi publik untuk belajar politik secara kolektif. Meskipun demikian, penulis berusaha tidak menempatkan peran pertanggungjawaban kolektif mengenai suatu isu menjadi tanggung jawab pribadi ketika membahas isu yang dibahas oleh *tirto.id*. Hal ini dikarenakan fokus utama penulis adalah narasi yang diberikan media *tirto.id* kepada publik, bukan respons khalayak sebagai warga negara yang tercerahkan mengenai suatu isu.

Meskipun Biesta menyumbang bentuk pedagogi publik, penjelasan mengenai cara menganalisis media atau kriteria dalam menentukan hadir tidaknya aspek pendidikan publik tidak tergambar dengan jelas. Bahkan, peneliti lain seperti Pierre Walter dan Allison Earl menyebutkan bahwa pedagogi publik adalah salah satu bidang riset yang masih belum diteliti dengan cukup di dalam jurnal penelitiannya yang membahas mengenai peran pedagogi publik di dalam seni jalanan mengenai isu lingkungan. Walter dan Earl menjelaskan bahwa pertanyaan mengenai 'siapa' pedagog, proses dan ruang yang didiami, hal yang dipelajari oleh berbagai aktor, 'siapa' yang menentukan pembelajaran ini, dan 'bagaimana' hal tersebut dibagikan beserta efeknya belum terjawab (Walter & Earl, 2017, p. 160).

Pendapat Walter dan Earl ini sejalan dengan pandangan Glenn Savage. Savage berargumen bahwa dalam rangka membuat konsep pedagogi publik masuk akal dalam sebuah penelitian, diperlukan pemahaman bahwa pedagogi publik perlu dikaitkan dengan sub kategori yang lebih terkenal (Savage, 2010, p. 108). Sebagai contoh, Savage menggunakan hasil penelitian Giroux mengenai film *Fight Club*

yang dikonsepsikan sebagai kekuatan pendidikan negatif yang berakar kuat di Amerika.

Secara sederhana, Giroux melihat film *Fight Club* sebagai bentuk pedagogi publik yang memperlihatkan kesempatan untuk terlibat dan memahami representasi politik sebagai bentuk dari komentar yang lebih luas dalam membahas mengenai konsumerisme, maskulinitas, kekerasan, politik, dan hubungan gender. Giroux di sini menempatkan film Hollywood sebagai mesin pengajaran di mana film yang dimaksud berfungsi sebagai pedagogi publik yang mengartikulasikan pengetahuan menjadi efek yang dengan sengaja memengaruhi 'bagaimana' dan 'apa' pengetahuan dan identitas yang dibentuk di dalam relasi sosial. Film seperti *Fight Club* dilihat sebagai upaya dalam menjembatani kesenjangan antara wacana privat dan publik yang secara bersamaan juga menjalankan nilai dan ideologi tertentu yang berkaitan dengan percakapan publik yang lebih besar tentang cara masyarakat melihat dirinya sendiri dan dunia kekuasaan, peristiwa, dan politik (Giroux H. , 2001, p. 6).

Giroux membedah film ini ke dalam sub kategori yang lebih sederhana: *Crisis of Everyday Life; Consumerism, Cynicism, and Hollywood Resistance; dan Violence and the Politics of Masculinity*. Berdasarkan penelitian ini, Giroux berpendapat proyek seperti *Fight Club* memberikan ruang untuk mengembangkan bentuk pedagogi publik yang secara kritis mengikutsertakan bagaimana bahasa, gambar, suara, kode, dan representasi bekerja dalam membuat struktur suatu asumsi dasar mengenai arti kebebasan, kewarganegaraan, kenangan publik, dan sejarah. Perhatian penuh mengenai relasi material dari suatu kekuasaan yang memproduksi

dan menyebarkan bentuk ‘pemikiran sehat’ dapat ditantang dan diubah baik di tingkat nasional dan transnasional. Dalam hal ini, pedagogi publik menghubungkan pengetahuan dengan kekuasaan sebagai upaya untuk memahami bagaimana cara memengaruhi perubahan sosial (Giroux H. , 2001, p. 23).

Sub kategori ini dapat sangat membantu penelitian sebagai contoh karena sejalan dengan cara kerja analisis naratif yang membedah narasi berita ke dalam aktor yang terlibat, struktur bercerita, dan oposisi biner. Selain itu, minimnya penelitian yang hanya fokus membahas pedagogi publik dalam artikel berita membuat hasil penelitian Giroux mengenai film *Fight Club* ini sebagai panduan tidak resmi cara membedah narasi ‘cerita’ menjadi bagian dari pedagogi publik sesuai aspek narasi yang diperhatikan (dalam penelitian ini, pemberitaan Omnibus Law Cipta Kerja). Selain itu, dari pembahasan film *Fight Club*, penulis menemukan penjelasan kriteria pedagogi implisit ketika Giroux menjelaskan bahwa *public pedagogy links knowledge to power in an effort to understand how to effect social change* (Giroux H. , 2001, p. 23). Hal ini membantu penulis dalam melihat isi artikel *tirto* dalam menjabarkan pengetahuan (informasi) yang dihubungkan dengan kekuasaan untuk kemudian dilihat ‘perannya’ dalam memengaruhi perubahan sosial.

Penulis memahami bahwa literatur mengenai pedagogi publik tidak memberikan kriteria secara eksplisit hal-hal yang dijadikan patokan dalam membedakan konten berita yang menunjukkan aspek pendidikan publik atau tidak. Namun, setelah menggali lebih jauh hasil penelitian dan *conceptual paper* Henry

Giroux, penulis menemukan kriteria implisit lainnya dalam menemukan aspek pendidikan publik di dalam konten media.

Giroux berpendapat bahwa menempatkan pedagogi publik sebagai praktik politik dapat menerangkan hubungan antara kekuasaan, pengetahuan, dan ideologi. Hal ini juga berarti mengakui peran yang secara sengaja dilakukan sebagai upaya untuk memengaruhi ‘bagaimana’ dan ‘apa’ pengetahuan yang dihasilkan di dalam suatu hubungan sosial (Giroux H. A., 2010, p. 494). Dalam kasus ini, penulis tidak akan mengikutsertakan ideologi media sebagai fokus penelitian. Selain itu, Giroux juga menjelaskan pedagogi harus membahas hubungan antara politik dan agensi, pengetahuan dan kekuasaan, posisi dan nilai subjek, dan pembelajaran dan perubahan sosial sembari membuka ruang terbuka untuk perdebatan, perlawanan, dan budaya bertanya (Giroux H. , 2010, p. 86).

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyeleksi beberapa kriteria implisit pendidikan publik atau pedagogi publik yang memiliki relevansi dengan cara kerja analisis naratif sebagai berikut.

Tabel 2.2 Konsep Pedagogi Publik yang Digunakan

<i>Tirto.id</i> sebagai fasilitator	Hubungan antara Pengetahuan dan Kekuasaan	Posisi dan Nilai Subjek	Sub Kategori Muncul
Melihat cara menjelaskan omnibus law dibantu dengan metode analisis naratif yang membedah alur, dan struktur narasi yang ditampilkan.	Jurnalis sebagai pekerja media akan menyeleksi informasi seperti apa yang akan muncul di berita. Penulis akan melihat cara penyampaian informasi melalui aktor-aktor yang terlibat dan bagaimana aktor-aktor ini dinarasikan. Dari analisis naratif, hal ini akan ditemukan dalam fungsi karakter dan tokoh narasi artikel berita.	Subjek yang menjadi fokus adalah aktor dan isu Omnibus Law Cipta Kerja. Posisi yang akan dilihat adalah peletakan konflik dan drama. Dari analisis naratif, hal ini dapat diperhatikan dari cerita dan alur, struktur narasi, serta karakter dan tokoh artikel berita.	Setelah menemukan jawaban dari ketiga kategori ini dan hasil dari analisis naratif oposisi biner, penulis akan menentukan sub kategori yang muncul.

Sumber: Penulis, 2020

2.2.2 *Citizenship*

Penelitian ini akan menggunakan konsep kewarganegaraan atau *citizenship* sebagai jembatan antara aspek pendidikan publik pemberitaan politik mengenai kebijakan publik dan peran media sebagai medium informasi. Secara garis besar, norma kewarganegaraan adalah nilai-nilai abadi tentang apa artinya menjadi warga negara yang baik atau harapan bersama tentang peran warga negara dalam politik. Harapan mengenai apa yang *sebaiknya* dilakukan oleh warga negara dapat berupa berpartisipasi secara politik, mematuhi hukum dan peraturan, membantu orang lain yang kurang beruntung, mengikuti pemilihan umum, bertugas di militer, dan membentuk opini secara independen (Dalton, 2008).

Sebagai upaya untuk menjelaskan sejauh mana konsep kewarganegaraan mempengaruhi partisipasi politik seseorang, norma ini dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu *dutiful citizens* yang dibahas oleh Russell Dalton dan *actualizing citizen* yang dibahas oleh Lance Bennett. *Dutiful citizens* dijelaskan sebagai warga negara yang menunjukkan partisipasi lewat pemilihan umum karena menganggap partisipasi jenis ini dianggap sebagai bentuk ‘warga negara yang baik’. Hal ini didasari juga dengan pemahaman bersama bahwa ‘warga negara yang baik’ adalah mereka yang menghormati otoritas, setia kepada negara, dan setiap orang memiliki kewajiban moral secara politik untuk ikut berpartisipasi (Dalton, 2006).

Berlawanan dengan ini, Bennet menjelaskan *actualizing norms* sebagai sikap berpartisipasi di luar aktivitas mengikuti pemilu. Hal ini dianggap sebagai tindakan ‘warga negara yang baik’ karena memiliki pemahaman bahwa partisipasi yang

sepatutnya dilakukan memerlukan pemikiran yang independen, bertanggung jawab secara sosial, dan memiliki ekspresi personal (Bennett L. , 2012).

Kedua konsep ini jika dihubungkan dengan penggunaan media dan partisipasi politik, Bennett berargumentasi bahwa konsumsi media tipe warga negara yang dibahas memiliki logika komunikasi yang khas. Bennet menyebutnya sebagai *dutiful communication logic* dan *actualizing communication logic*.

Bennet mendefinisikan *dutiful communication logic* sebagai konsumsi yang secara primer bersifat satu arah dengan jarak yang jelas antara siapa yang memproduksi dan siapa yang mengonsumsi. Logika ini juga menyebutkan bahwa *dutiful citizen* lebih menyukai media konvensional dan lebih memercayai informasi yang berasal dari sumber resmi seperti pers, pejabat publik, dan *opinion leaders* (Bennett, Wells, & Freelon, 2011).

Di lain sisi, Bennet menjelaskan *actualizing communication logic* sebagai komunikasi yang terjadi di lingkungan media digital yang memiliki kecenderungan komunikasi dua arah atau interaktif sehingga setiap orang bisa mengonsumsi, memproduksi, dan mendistribusikan informasi (Bennett, Wells, & Freelon, 2011).

Jika dikaitkan dengan penggunaan media dan konsep kewarganegaraan, logika komunikasi ini mengategorikan *dutiful citizens* sebagai warga negara yang cenderung lebih mengonsumsi media tradisional dan *actualizing citizens* yang lebih menyukai media baru. Berkat perkembangan riset, kedua konsep ini dipertanyakan oleh Copeland dan Feezell karena hasil penelitian berbasis survei di Amerika menunjukkan media baru berperan dalam memengaruhi kedua norma kewarganegaraan ini. Meskipun hasil penelitian tidak bisa digeneralisasikan

dengan keadaan di Indonesia (belum ada penelitiannya), penulis mengikuti logika penemuan ini dengan menanamkan pemahaman bahwa media baru memengaruhi partisipasi politik seseorang.

Berdasarkan konsep yang dijelaskan Bennett, warga negara di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai *actualizing citizens* karena keikutsertaannya dalam kegiatan politik yang bersifat ekspresif seperti aksi demonstrasi yang menolak omnibus law. Selain demonstrasi, warga negara Indonesia juga menunjukkan aksi penolakannya melalui platform digital seperti petisi di *change.org* sebagai bentuk ekspresinya sebagai warga negara. Data dari *change.org* menyebutkan sebanyak 2,3 juta suara mengenai aksi demokrasi dan antikorupsi serta sebanyak 1 juta suara untuk petisi di bawah gerakan #ReformasiDikorupsi (CNN Indonesia , 2020).

Berangkat dari konsep yang mengaitkan hubungan antara warga negara dan penggunaan media, konten yang disajikan media memiliki peran krusial dalam mendorong kegiatan politik yang dilakukan warga negara didasari oleh argumen yang rasional dan logis. Terutama, ketika membahas mengenai kebijakan publik yang jika disahkan notabene menyikat secara hukum.

Jika dikontekskan dengan keadaan yang ada di Indonesia, Lambang Trijono menjelaskan pentingnya melihat bagaimana cara media menyampaikan berita seputar politik dan dampaknya bagi politik kewarganegaraan. Melalui artikel yang ditulis di dalam jurnal *Demokrasi Digital dalam Pilkada Serentak 2017*, Trijono menjelaskan bahwa media memerlukan strategi dalam membentuk subjek politik demokratis yang menampilkan ‘sesuatu’ yang absen di kehidupan publik tetapi diperlukan untuk berkembangnya masyarakat demokratis. Media perlu

memerhatikan 2 hal dalam mempresentasikan berita berbau politik (Triyono, 2016, p. 37).

1. Media perlu mempertimbangkan bahwa representasi berita politik memiliki arti yang sama dengan menunjukkan praktik politik demokratis di kehidupan publik. Artinya, representasi ini akan membentuk identitas dan kehidupan publik. Hal ini perlu dicermati dalam mempertimbangkan kehidupan publik seperti apa yang ingin dibentuk.
2. Terdapat konsekuensi bahwa cita-cita politik masyarakat hendak dibentuk. Arti penting pada poin ini juga mempertanyakan politik kewarganegaraan seperti apa yang ingin dibentuk.

Berdasarkan penjelasan Triyono di atas, strategi media ini dapat dikerucutkan lagi melalui penelitian ini yang memfokuskan pembahasan apakah strategi yang dilakukan sesuai dengan aspek pendidikan publik. Arti penting strategi media dalam menampilkan informasi publik mengonfirmasi pentingnya pengelolaan isi berita terhadap sikap politik warga negara dan kontribusinya untuk masa depan negara. Dengan fokus pada *actualizing citizenship*, penelitian ini akan menekankan konsep kewarganegaraan yang memengaruhi sikap partisipasi seseorang berdasarkan apa yang dikonsumsi dari media. Karena *actualizing citizenship* lebih terlibat dalam kegiatan politik di luar pemilu, maka memastikan tindakan yang dilakukan dilandasi oleh pengetahuan yang solid dengan intensi media dalam mendidik publik (*media as public pedagogy*), penulis akan melakukan analisis naratif untuk menyorot narasi media *tirto.id* sebagai *watchdog* sekaligus *an informal educator*.

2.2.3 Peran Pers: *Journalism as fourth estate*

Pengertian mengenai konsep jurnalisme dijelaskan secara ringkas di dalam buku *Encyclopedia of Political Communication. The fourth estate* mengacu pada pers sebagai ‘kekuatan tambahan’ (*additional power*) di masyarakat. Sistem politik di Indonesia menempatkan badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai tiga pilar pertama demokrasi. Pers menjadi peran ‘tambahan’ sebagai ‘memegang kekuasaan’. Fungsi dari pers adalah menyediakan informasi mengenai aktivitas pemerintah dan aktivitas pemegang kekuasaan lainnya. Di dalam konstruksi filsuf Edmund Burke, pers adalah elemen paling penting di tengah masyarakat karena perannya sebagai anjing penjaga dan memberikan tempat bagi warga biasa untuk berekspresi. Pers menjaga nilai-nilai sentral demokrasi dan memeriksa hadir tidaknya penyalahgunaan kekuasaan oleh negara (Bulla, 2008, pp. 251-252).

Keterkaitan antara pilar ke-empat demokrasi dan peran pers yang diatur di dalamnya sebagai *watchdog* juga dapat ditemui di dalam *conceptual journal* yang membahas peran jurnalistik di domain politik dan kehidupan sehari-hari. Jurnal yang dibuat oleh Thomas Hanitzsch dan Tim Vos ini membahas mengenai konseptualisasi mengenai fungsi jurnalisme seperti sebagai pengawas, fungsi korelasi, fungsi transmisi, dan fungsi hiburan yang kerap menjadi patokan utama dalam membahas hal-hal normatif. Namun, hal-hal ini adalah konseptualisasi model lama. Peneliti jurnalisme menghabiskan beberapa dekade dalam mempelajari peran jurnalis dalam konteks politik. Jurnalis juga diharapkan melakukan fungsinya dalam domain sehari-hari seperti memberikan bantuan, saran, petunjuk, dan informasi (Hanitzsch & Vos, 2016).

Terdapat 18 peran jurnalis di dalam orientasi politik yang dibahas oleh jurnal ini dari sudut pandang negara barat dan negara non-barat. Peran yang berhubungan secara langsung dengan konsep pilar ke-empat adalah *the critical-monitorial*. Peran ini didasari oleh idealnya dunia jurnalisme yang berperan sebagai *Fourth Estate* atau pilar ke-empat demokrasi. Jurnalis yang memberikan kritik dan membuat pihak yang berkuasa bertanggung jawab akan kekuasaannya akan menciptakan warga negara yang kritis. Peran ini terbagi menjadi 3 tipe (Hanitzsch & Vos, 2016, p. 9).

- a. *The monitor*: ini adalah tipe yang paling pasif. Peran ini menggolongkan jurnalis sebagai pengamat kritis dari kegiatan politik (jurnalis hanya menyadarinya).
- b. *The detective*: peran ini berarti jurnalis menginspeksi pernyataan dari pemerintah dan mengumpulkan informasi mengenai isu yang dicurigai oleh jurnalis. Oleh karenanya gambaran menjadi seorang detektif adalah hal yang tepat dalam mewakili peran ini. Elemen lain yang ada pada peran ini adalah verifikasi, terutama pada materi-materi yang didapat dari pihak luar di era media elektronik.
- c. *The watchdog*: peran ini bahkan lebih aktif dan tegas. Jurnalis yang menjalankan peran ini secara proaktif menginspeksi pemimpin politik dan pemimpin bisnis. Mereka akan memberikan kritik mengenai masyarakat dan institusi yang ada secara independen. Secara sah, peran *watchdog* adalah yang paling kuat dalam menghadapi kekuatan yang ada.

Konsep jurnalisme sebagai pilar ke-empat menyumbang pemahaman dan ekspetasi penulis dalam melakukan penelitian bahwa analisis naratif pemberitaan *tirto.id* akan masuk ke dalam kategorisasi media yang menjelaskan aspek pendidikan publik di domain politik. Secara konseptual, media akan menjalankan peran sebagai anjing penjaga dalam mengawal kebijakan publik yang dibuat oleh badan legislatif dan eksekutif. Dalam mengawal kebijakan, warga negara yang disediakan informasi oleh media akan diberikan konstruksi pemberitaan sesuai realitas mengenai pro-kontra RUU Omnibus Law. Pemahaman yang terjadi di kalangan warga negara dapat menjadi langkah dalam menciptakan debat publik berdasarkan informasi yang bersifat mendidik sehingga segala bentuk partisipasi politik warga negara didasari oleh pemikiran rasional, kritis, dan tercerahkan.

2.2.4 Fungsi Pers

Apek pendidikan publik atau pedagogi publik juga hadir dari sudut pandang jurnalistik. Hal ini dibahas di dalam UU No.40 Tahun 1999 tentang pers. Di dalam UU ini, aspek pendidikan publik tertera di Bab II yang membahas “Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan Peranan Pers”. Secara spesifik penulis akan fokus kepada fungsi pers yang berhubungan sebagai ‘pendidik’ publik.

Berdasarkan Bab II Pasal 3 ayat (1), *pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial*. Fungsi ini secara lebih detail dibahas di dalam pasal 6 yang berisikan 5 poin sebagai berikut.

- a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;

- b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

Berdasarkan pasal 3 ayat (1) di atas, pers yang dalam kasus ini adalah media alternatif *tirto.id* secara hukum terikat perannya sebagai lembaga sosial yang berfungsi sebagai pendidik. Keterikatan di dalam hukum ini ditambah dengan konsep pedagogi publik yang secara spesifik membahas aspek pendidikan menjadi fokus utama penelitian. Hadir atau tidaknya aspek pendidikan dari aturan hukum pers dan ilmu pendidikan ini menjadi kolaborasi yang menarik untuk dilihat di dalam isi berita. Selain memenuhi fungsi media sebagai pendidik publik, penulis juga akan memperhatikan fungsi pers yang tertera di dalam undang-undang sejalan dengan konten yang dihasilkan *tirto.id*. Melihat adanya keterkaitan antara fungsi pendidikan oleh pers, tuntutan agar media menjalankan aspek pendidikan publik domain politik, hubungannya dengan penggunaan media alternatif yang memengaruhi sikap politik warga negara, serta memastikan sikap politik yang dipilih didasari dengan pengetahuan yang cukup menambah peran penting penelitian ini sebagai awal mula dari serial penelitian selanjutnya mengenai media sebagai pedagogi publik di Indonesia.

2.2.5 *Tirto.id*

Media daring *tirto.id* pertama kali tayang pada Februari 2016 dan kemudian diresmikan pada 3 Agustus 2016. Memiliki slogan “Jernih, Mengalir, Mencerahkan” penulis melihat potensi *tirto.id* sebagai media daring yang menunjukkan kualitas lebih dalam hal mementingkan kedalaman berita dibandingkan kecepatan seperti media daring pada umumnya.

Dilansir dari *website tirto.id*, media ini melihat visinya sebagai “keharusan menyajikan tulisan-tulisan yang jernih, mencerahkan, berwawasan, memiliki konteks, mendalam, investigatif, faktual.” Tirto sendiri adalah pengucapan alternatif dari kata “tirta” yang berarti air. Dalam konteks ini, *tirto* berharap menjadi media yang mencita-citakan jurnalisme seperti “air yang mengalir, mengisi ceruk, sekaligus jernih—menunjukkan kedalaman” (Tim Redaksi Tirto.id, 2016).

Penulis tertarik dengan cara *tirto.id* menerjemahkan visi “mencerahkan” yang dapat dihubungkan dengan keinginan untuk mendidik publik. Sebagai sebuah instansi, *tirto* juga memiliki tanggung jawab dalam mendidik publik dan berperan sebagai *watchdog* seperti yang telah dijelaskan di poin sebelumnya. Berdasarkan *website tirto.id*, media ini melihat “mencerahkan” sebagai “keharusan menyajikan tulisan-tulisan yang jernih (*clear*), mencerahkan (*enlighten*), berwawasan (*insightful*), memiliki konteks (*contextual*), mendalam (*indepth*), investigatif, faktual, didukung banyak data kuantitatif dan kualitatif—baik sekunder maupun primer, serta dapat dipertanggungjawabkan.”

Selain itu, alasan lain media ini dinamai “Tirto” juga ditunjukkan sebagai rasa hormat kepada Tirto Adhi Soerjo (1880-1918) sebagai Bapak Pers Nasional yang ditetapkan pada 1973. Almarhum Tirto berkiprah di jurnalisme sebagai pendiri Soenda Berita, Medan Prijaji, dan Putri Hindia. Pada zamannya, Tirto Adhi Soerjo menggunakan surat kabar sebagai alat perlawanan Hindia Belanda (Tim Redaksi Tirto.id, 2016).

Tirto.id didirikan oleh Sapto Anggoro ditemani oleh Teguh Budi Santoso dan Nur Samsi. Saat ini, pemimpin redaksi dan penanggungjawab *tirto.id* adalah Sapto Anggoro. Sementara itu, Teguh Budi Santoso berperan sebagai *Chief Content Officer* sementara Nur Samsi berperan sebagai *Chief Technology Officer*. Sejauh ini, penulis tidak melihat adanya afiliasi politik ataupun ekonomi yang memungkinkan adanya konflik kepentingan dalam mempublikasikan berita di *tirto.id*. Ketika pendiri *tirto.id* saat ini hanya berkecimpung sebagai redaktur perusahaan bidang media bernama Binokular Media Utama. Lebih lanjut lagi, pada laman “Tentang Kami” *tirto.id* juga menyebutkan pendanaan *tirto.id* dilakukan secara mandiri oleh ketiga tokoh ini.

Dari filosofis media dan struktur redaksi tersebut, penulis melihat media *tirto* sebagai alternatif media daring pada umumnya yang hanya mementingkan kecepatan tanpa memikirkan keakuratan informasi dan prinsip verifikasi yang diiringi oleh data yang dapat dipertanggungjawabkan. Terlebih lagi, topik yang akan dianalisis penulis mencakup hajat hidup warga negara karena membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Dihubungkan kembali dengan objektif penelitian ini yang ingin menemukan aspek pendidikan publik dari teks berita, penulis yang memutuskan menggunakan *tirto.id* sebagai subjek penelitian juga didasari oleh harapan bahwa *tirto.id* sadar akan fungsi dan peranya sebagai lembaga pendidikan dan seorang *watchdog* berdasarkan visi dan misi media yang tertera di laman webnya. Selain mengandalkan “Tentang Kami” sebagai sumber informasi dalam memahami struktur internal *tirto.id*, penulis juga merujuk kepada hasil penelitian yang melakukan studi kasus terhadap media ini.

Studi kasus yang dibuat oleh Suluh Ciptadi dan Ade Armando pada tahun 2018 melihat upaya *tirto.id* sebagai media *online* yang berupaya melawan logika jangka pendek jurnalisme daring. Hal ini akan memengaruhi bentuk berita media yang ditampilkan secara ringkas, berkelanjutan, sensasional, dan fokus utamanya hanya pada banyaknya jumlah *clickers* dan *viewers* (Ciptadi & Armando, 2018, p. 62).

Hasil studi kasus ini memperkuat alasan penulis dalam memilih *tirto* sebagai media yang patut diteliti. Pasalnya, hasil penelitian Ciptadi dan Armando menunjukkan empat bentuk resistensi *tirto* terhadap logika jangka pendek. Terdapat empat bentuk resistensi yang dilakukan *tirto*. Pertama, media ini menganggap kecepatan bukanlah hal utama jurnalisme daring. Ciri khas *tirto* adalah menunggu seluruh informasi terkumpul sebelum menerbitkan berita. Meskipun masuk ke dalam berita terkini, *tirto* bersikeras tidak akan menampilkan berita yang hanya menampilkan keterangan satu narasumber. Kedua, *tirto* menerapkan prinsip *cover both sides*. Dalam hal ini, *tirto* memastikan untuk menampilkan narasumber yang

terkonfirmasi di dalam berita. *Tirto* beranggapan media daring tidak harus cepat dan ringkas. Ketiga, *tirto* lebih mementingkan kedalaman berita dibandingkan jumlah berita perhari. Keharusan memproduksi berita beberapa menit sekali bukanlah hal yang dianut *tirto*. Hal ini menjadi peluang bagi *tirto* agar tidak mengabaikan kedalaman dan verifikasi informasi dalam memproduksi beritanya. Bahkan, *tirto* mencoba mematahkan pandangan pembaca berita tidak akan tertarik dengan berita mendalam dan penuh data. Hal ini juga yang menjadi ciri khas *tirto* dalam hal menyajikan data dalam bentuk infografik sebagai daya tarik. Keempat, Ciptadi dan Armando mengikutsertakan hasil wawancara dengan Sapto Anggoro yang mengatakan *tirto* tidak menjadikan iklan sebagai tujuan utama. Menurut Sapto, *tirto* tidak memiliki target menarik pembaca sebanyak-banyaknya. Target utama *tirto* adalah anak-anak muda serta pembaca yang mengindahkan keakuratan data berita daring (Ciptadi & Armando, 2018, pp. 68-69).

Profil *tirto* dan hasil penelitian terkini yang memverifikasi bahwa *tirto* menjalankan visinya sebagai media yang mencerahkan pembacanya dengan mementingkan kedalaman dan kualitas berita ketimbang jumlah berita. Penulis melihat hal ini sebagai alasan yang tepat dalam meneliti cara *tirto* menampilkan berita mengenai Omnibus Law RUU Cipta Kerja saat draf RUU ini pertama kali dikeluarkan pada Februari 2020. Pada periode ini, penulis melihat bahwa Omnibus Law pertama yang dikeluarkan pemerintah berorientasi pada investasi dan menuai banyak kritik. Peran media sebagai pendidik publik mengenai rancangan kebijakan publik menjadi hal yang krusial karena menyangkut sikap kritis dan sikap menjadi warga negara yang baik (sadar akan hak dan kewajiban). Dengan penelitian ini,

penulis akan melihat cara *tirto* yang memiliki misi mencerahkan pembaca dari sudut pandang aspek pendidikan publik.

2.3 ALUR PENELITIAN

Tirto.id dikenal sebagai media yang melakukan resistensi logika jangka pendek yang mementingkan kecepatan dibandingkan kedalaman informasi. Ditambah dengan pendanaan media *tirto.id* yang dilakukan secara mandiri oleh ketiga pendirinya, *tirto.id* membuktikan diri sebagai media non-partisan yang tidak memiliki kepentingan politik-ekonomi layaknya media daring pada umumnya. Tidak memiliki konflik kepentingan dan memiliki prioritas dalam mencerahkan pembacanya, media ini berpotensi dalam menghadirkan aspek pendidikan publik.

Aspek pendidikan publik media juga sejalan dengan peran pers sebagai *watchdog* dan fungsi pendidikan sesuai amanat UU N0.40 tahun 1999 tentang Pers. Sebagai anjing penjaga, media menjadi kekuatan tambahan masyarakat dalam mengawasi kekuasaan pemerintah dalam membuat kebijakan publik. Hal ini akan sulit dilakukan jika media terafiliasi secara politik dengan pemerintah. Selain itu, media memiliki fungsi pendidikan sesuai dengan UU Pers Pasal 6 dalam poin (c) dan (d) yang secara khusus menjelaskan bahwa pers memiliki fungsi dalam: (c) *mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar* dan (d) *melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik*.

Peran dan fungsi pers ini menempatkan media sebagai fasilitator yang dapat

mendorong adanya pembentukan identitas masyarakat menjadi warga negara yang baik (*good citizenship*). Hal ini menjadi penting untuk diteliti karena dapat dijadikan alat prediksi partisipasi politik warga negara. Media mampu mendorong warga negara untuk sadar akan hak dan kewajibannya terlebih saat proses pembahasan kebijakan publik tengah dilakukan.

Berdasarkan profil media yang secara ideal mampu memenuhi peran anjing penjaga dan fungsi pendidikan, penulis dapat menemukan aspek pendidikan publik secara eksplisit dan implisit berdasarkan hasil analisis naratif. Aspek pendidikan publik hadir melalui cara media sebagai fasilitator menjelaskan mengenai omnibus law, cara media menghubungkan antara kekuasaan (jabatan dan latar belakang) dan pengetahuan (informasi ‘apa’ yang diberikan) dalam mengutip narasumber, dan posisi dan nilai subjek berita (konflik dan drama).

Ketiga hal tersebut adalah poin yang dapat dilihat dari teks berita secara eksplisit. Sebagai langkah lebih lanjut dalam melihat cara *tirto* menjalankan aspek pendidikan publik, hasil oposisi biner dari analisis naratif akan menunjukkan makna implisit berupa nilai yang diberikan media dalam meliput pemberitaan omnibus law. Oposisi biner ini dalam perspektif aspek pendidikan publik akan dilihat sebagai sub kategori yang muncul untuk mempermudah memahami nilai yang dilegitimasi media dalam memproduksi berita. Dengan demikian, hasil analisis naratif teks berita akan mendeskripsikan cara *tirto.id* menjalankan aspek pendidikan publik dalam pemberitaan omnibus law.